

MODEL PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF PADA PEREMPUAN PERDESAAN

DISUSUN OLEH: **Drs. AT. Hendrawijaya., SH., M.Kes**
Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc

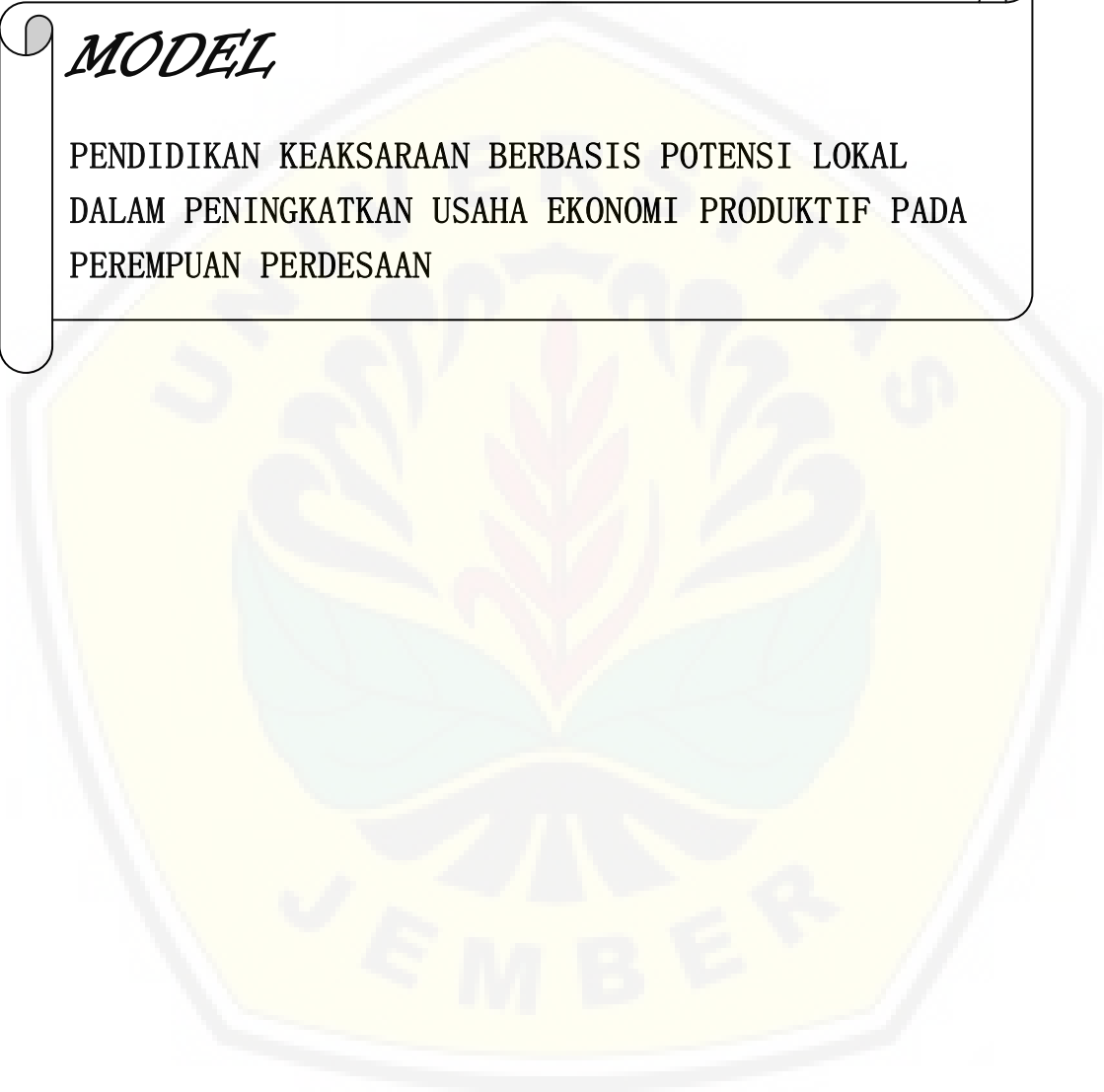


UNIVERSITAS JEMBER
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2016



MODEL

PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS POTENSI LOKAL
DALAM PENINGKATKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF PADA
PEREMPUAN PERDESAAN





**MODEL PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM
PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF PADA PEREMPUAN PERDESAAN**

Dikembangkan Oleh:

Drs. AT. Hendrawijaya., SH., M. Kes

Deditiani Tri Indrianti, S. Pd., M. Sc

Dana Skim Penelitian Hibah Terapan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga kami sebagai tim peneliti dapat mengembangkan model pendidikan keaksaraan berbasis potensi lokal dalam peningkatan usaha ekonomi produktif pada perempuan perdesaan.

Buku pedoman yang kami susun atas merupakan bagian pengembangan ilmu yang dikaji melalui berbagai teori yang relevan. Dimana tim menilai bahwa penyelenggaraan pendidikan keaksaraan selama ini belum bermakna dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat. Mengingat sebagian besar warga belajar pendidikan keaksaraan adalah perempuan di kalangan perdesaan yang merupakan penyangga ekonomi keluarga. Hal ini yang kurang menjadi fokus kajian pada proses pendidikan keaksaraan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun model ini. Terutama kepada kemenristek dikti yang telah memberikan dana. Semoga model ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan penyelenggaraan bagi praktisi pendidikan keaksaraan.

Jember, Oktober 2016
Tim Penyusun Model

Drs. AT. Hendrawijaya SH., M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar - IV

Daftar Isi- V

BAB I Pendahuluan -1

A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	4

BAB II PROTOTYPE MODEL -5

A. Chart Model.....	5
B. Modul Pembelajaran.....	7

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN -10

A. Persiapan.....	10
B. Tahap Pelaksanaan.....	11
C. Tahap Evaluasi.....	12
D. Tahap tindak Lanjut.....	12

BAB IV PENUTUP -13

A. Prasyarat Model.....	13
B. Kekuatan Model.....	13
C. Kelemahan Model.....	13

LAMPIRAN -14

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar belakang

Pada hakekatnya, program keaksaraan memiliki orientasi untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat guna meningkatkan keterampilan hidup melalui kegiatan baca, tulis, hitung. Dimana indikator kompetensi yang harus dimiliki warga belajar antara lain kemampuan dalam mengembangkan proses berfikir kritis yang sesuai konteks sosial, kemampuan melakukan analisa serta kemampuan membaca peluang yang dapat menjadi sumber kebutuhan hidup. Harapannya, terjadi perubahan dari situasi kehidupan masyarakat parsial menuju kehidupan yang berencana (*planning society*).

Namun, implementasi di lapangan, program dijalankan alakadarnya. Kemampuan baca tulis hitung belum dibarengi oleh materi pembelajaran yang lebih kontekstual dalam menjawab kebutuhan warga belajar. Bahkan, psikologi warga belajar sebagai orang dewasa belum menjadi fokus perhatian dalam penyelenggaraan program tersebut. Akibatnya, karakteristik warga belajar lepas dari perhatian. Selain itu, konteks lokal maupun kebutuhan warga belajar belum menjadi bagian program yang diselesaikan dalam pembelajaran.

Selain itu, adanya potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sumberbelajar dalam program keaksaraan fungsional bagi perempuan. dimana perempuan memiliki peran sebagai penyangga ekonomi keluarga. Namun, belum diimbangi oleh kesadaran dan pengetahuan yang maksimal untuk membaca peluang usaha guna mengakses ekonomi yang berpengaruh terhadap sumber kebutuhan hidup. Mengingat, sebagian besar perempuan perdesaan belum memiliki pengetahuan baca-tulis-hitung sebagai pengetahuan dasar. Akibatnya perempuan perdesaan mengalami buta aksara yang menyebabkan rendahnya tingkat keberdayaan. Oleh sebab itulah perempuan perdesaan merupakan sasaran utama program pendidikan keaksaraan fungsional. Mengingat program pendidikan keaksaraan fungsional merupakan instrumen yang diperlukan untuk mengubah tatanan kehidupan sosial dan ekonomi.

Program pendidikan keaksaraan fungsional diarahkan dan dikembangkan untuk merangsang masyarakat dalam berfikir kritis, serta dapat memanfaatkan aksara yang sesuai dengan peran sosial yang disandangnya. Tujuannya, meningkatkan pengetahuan dasar masyarakat melalui kegiatan baca-tulis-hitung. Sebagaimana dikatakan oleh Napitupulu (1998:4), bahwa keaksaraan diartikan sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh setiap manusia. Harapannya terjadi perubahan pada level individu dan masyarakat.

Proses pembelajaran hanya mengenalkan huruf dan angka. Aksara belum difungsikan untuk menjawab kebutuhan perempuan di tingkat lokal. Selain itu kegiatan pembelajaran belum menyentuh upaya peningkatan kesadaran perempuan guna merespon situasi yang ada disekitarnya. Selain itu, tingkat keberhasilan program masih diukur dari kemampuan perempuan dalam menggunakan keterampilan baca-tulis-hitung. Kemampuan berfikir kritis guna membaca peluang ekonomi dan peningkatan kecakapan hidup perempuan belum menjadi tolak ukur keberhasilan program.

Oleh karena itu, mesti ada rumusan baru dalam menyelenggarakan program keaksaraan fungsional yang didesain sesuai konteks lokal. Hal ini merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai dasar menyelenggarakan pembelajaran. Untuk itu, pembelajaran lebih memperhatikan; 1) karakteristik dan potensi warga belajar ditingkat lokal, 2) membangkitkan motivasi dan potensi warga belajar, 3) fungsional dan langsung bermanfaat dalam kehidupan warga belajar untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan perempuan dalam membaca peluang ekonomi.

Perhatian ini berguna sebagai dasar mengembangkan model pembelajaran keaksaraan fungsional sebagai gerakan pemberantasan buta aksara untuk meningkatkan keberdayaan perempuan perdesaan, sehingga mampu menciptakan dan meningkatkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan potensi lokal melalui gerakan kritis transformatif. Mengingat, masyarakat memiliki tatanan sebagai wujud interkoneksi antara berbagai sendi kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amin (2005:172), bahwa masyarakat yang mendiami

suatu bentang ruang tertentu dengan kelembagaan dan sistem kepercayaan yang beragam, serta sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup, semuanya mesti dilihat dari satu kesatuan. Lembaga sosial dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan mampu menjamin stabilitas kelangsungan hidup masyarakat karena terbentuk atas kepentingan kolektif yang sesuai norma dan karakteristik masyarakat di tingkat lokal.

F. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pelaksanaan program keakasaraan fungsional antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010- 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;

G. Tujuan

Model ini disusun bertujuan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan yang lebih tepat untuk perempuan perdesaan yang sebagian besar berperan sebagai penyangga ekonomi keluarga, sehingga terdapat peningkatan usaha ekonomi produktif. Mengingat, persoalan kemiskinan di perdesaan terjadi karena ketidakmampuan perempuan dalam menguasai dan menggunakan keterampilan baca-tulis-hitung akibat ketimpangan gender.

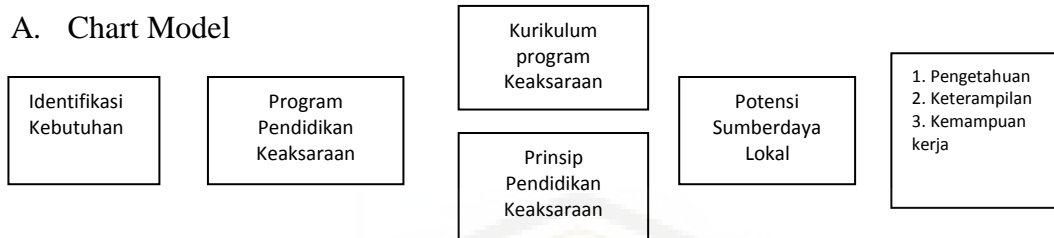
H. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari model yang telah disusun ini antara lain adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pemangku kebijakan program pendidikan keaksaraan fungsional,
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun program pembelajaran yang lebih memperhatikan potensi lokal,
3. Sebagai pedoman bagi tutor dalam menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar,
4. Sebagai model alternatif dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal yang dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

BAB II PROTIPE MODEL

A. Chart Model



1. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi merupakan proses menemukan dan mengenali kebutuhan program keaksaraan. Adapun kebutuhan meliputi:

- a. Sosial budaya
- b. Potensi alam
- c. Minat dan kebutuhan masyarakat sebagai warga belajar
- d. Potensi ekonomi

2. Program Pembelajaran

Merupakan orientasi program yang dilakukan meliputi kegiatan sosialisasi dan pengenalan program pendidikan keaksaraan yang disertai penjelasan tentang fungsi dan manfaat diperoleh dari program yang dilaksanakan

3. Prinsip Pembelajaran
4. Potensi Sumberdaya Lokal
5. Indikator Keberhasilan Pembelajaran

Apa yang dipelajari di kelompok belajar harus dapat ditetapkan atau difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus menerapkan kemampuan baca-tulis hitung dalam kehidupannya, seperti dapat

6. Evaluasi Pembelajaran

B. Model Pembelajaran

1. Warga Belajar

Sasaran program keaksaraan yang akan menjadi warga belajar adalah perempuan penyandang buta aksara yang berusia 15 tahun sampai 45 tahun. Namun dikelompokkan berdasarkan kelompok usia. Adapun kriteria warga belajar program keaksaraan antara lain:

1. Kelompok usia 16-24 (prioritas I), usia 25-44 (prioritas II) dan 45 ke atas prioritas III
2. Warga masyarakat buta huruf (khususnya perempuan) dan miskin putus SD/MI kelas I-III
3. Berdomisili tetap
4. Perempuan perdesaan yang memiliki kemauan berwirausaha

2. Penyelenggara

Adalah unsur dinas pendidikan (Penilim PLS, TLD, SKB) dan atau Yayasan/LSM, pondok Pesantren, PKBM, maupun individu yang memiliki pengetahuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk kemudian dijadikan sumber ekonomi bagi perempuan

3. Tutor

Adapun tutor keaksaraan antara lain adalah:

1. Berpendidikan minimal SLTA dan telah mengikuti pelatihan tutor
2. Bertempat tinggal di lokasi kegiatan belajar dilaksanakan (berasal dari daerah setempat)
3. Mampu mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar Warga belajar, dan menguasai substansi materi yang akan di belajarkan
4. Mampu mengembangkan metode pembelajaran partisipatif dan memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan kewajibannya sebagai tutor.

5. Sumber Belajar

6. Kelompok Belajar

Dapat dibentuk dimana saja dengan syarat:

1. Setiap kelompok terdiri dari 10-15 warga belajar, dan dibimbing oleh satu orang tutor yang sudah dilatih
2. Waktu dan jadwal pertemuan di kelompok ditentukan bersama-sama antara tutor dengan WB (minimal 2-3 kali seminggu @ 90 menit selama 9 bulan berjalan)
3. Tersedia tempat belajar, seperti rumah penduduk, balai desa/ pemerintah yang mudah dijangkau oleh warga belajar, dan tersedia bahan-bahan belajar yang relevan dengan kebutuhan dan minat, serta masalah yang dihadapi warga belajar.

7. Tempat Belajar

8. Metode dan Media

9. Program Belajar

Dirancang bersama warga belajar, yang berisi obyek spesifik dan dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh warga belajar, dan dimulai dari satu bagian ke bagian lainnya sesuai kontrak belajar. Untuk program belajar keaksaraan cukup terbagi menjadi dua aspek yaitu: 1) baca, tulis, hitung fungsional yang bertujuan meningkatkan mutu hidup. 2) aspek keterampilan fungsional yang mengacu pada peningkatan taraf hidup

10. Bahan Ajar

Menggunakan segala potensi yang ada, tidak mesti berasal buku paket atau bahan ajar yang berisi informasi fungsional, tetapi bahan belajar ini dapat saja dibuat dan diciptaan sendiri oleh warga belajar bersama tutor dan semaksimal mungkin menggunakan media yang ada atau dapat disediakan sendiri dari lingkungan sekitar, seperti KTP, KK

11. Ragi Belajar

12. Hasil Belajar

Warga belajar secara terus menerus mengikuti perkembangan dan efek komunitas. Bila perlu menggunakan perbaikan program. Warga belajar dan tutor beresama-sama menjadi evaluator. Penekanan pada proses evaluasi adalah evaluasi peserta didik dan kemajuan belajar



BAB III STRATEGI PELAKSANAAN

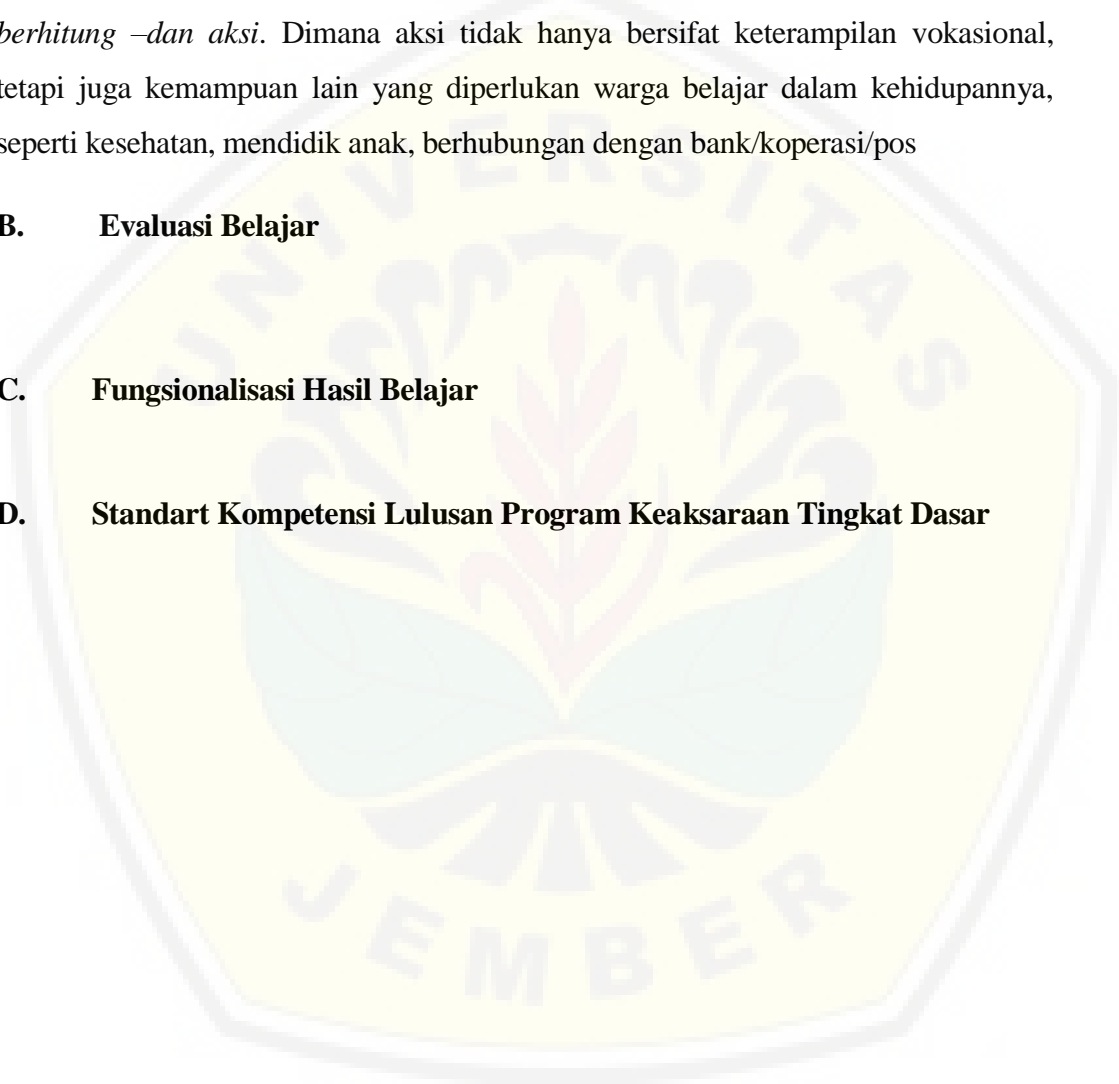
A. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran mengutamakan daur: *diskusi-menulis-membaca-berhitung –dan aksi*. Dimana aksi tidak hanya bersifat keterampilan vokasional, tetapi juga kemampuan lain yang diperlukan warga belajar dalam kehidupannya, seperti kesehatan, mendidik anak, berhubungan dengan bank/koperasi/pos

B. Evaluasi Belajar

C. Fungsionalisasi Hasil Belajar

D. Standart Kompetensi Lulusan Program Keaksaraan Tingkat Dasar



BAB IV PENUTUP

